



PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

Reginald Gogo Acacius Dao, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo¹

Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of local government characteristics and audit findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) on the performance of provincial governments in Indonesia. The characteristics analyzed include government size (total assets), regional wealth (ratio of Own-Source Revenue to total revenue), fiscal dependency on the central government (ratio of General Allocation Fund to revenue), and capital expenditure. The study is motivated by the importance of public accountability and the use of Regional Government Administration Reports (LPPD) and Regional Government Performance Evaluation (EKPPD) as official performance assessment instruments from the Ministry of Home Affairs.

This research employs a quantitative approach using ordinal logistic regression analysis. The population consists of 34 provincial governments in Indonesia, selected using purposive sampling based on data completeness for the year 2022. Data were collected from official sources including the Ministry of Home Affairs, the Audit Board (BPK), and the Directorate General of Fiscal Balance. The dependent variable is the provincial government performance score, while the independent variables include government size, regional wealth, fiscal dependency, capital expenditure, and audit findings.

The results indicate that government size has a positive and significant effect on performance, while audit findings have a significant negative effect. However, regional wealth, fiscal dependency, and capital expenditure do not show a significant effect. These findings support agency theory, which emphasizes the role of external monitoring and transparency in reducing information asymmetry. The study is expected to serve as a reference for local governments and oversight institutions in formulating more accountable financial management and governance policies.

Keywords: *local government performance, audit findings, government size, fiscal dependency.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang kemudian dievaluasi melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas melalui audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu. Temuan audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sering kali menunjukkan kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah. Temuan-temuan ini berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah dan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Mustikarini dan Fitriasari (2012) menemukan bahwa ukuran daerah, kekayaan, dan ketergantungan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sementara belanja daerah tidak. Sudarsana (2013)

¹ Corresponding author

menemukan bahwa hanya kekayaan daerah yang berpengaruh positif signifikan, sementara audit BPK berpengaruh negatif. Penelitian lain (Hatimah, 2018; Izaturrohman, 2018) juga memberikan hasil yang berbeda terkait signifikansi variabel-variabel tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya kesimpulan yang konsisten mengenai faktor-faktor penentu kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran, kekayaan, ketergantungan fiskal, belanja modal) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terkini dengan menggunakan data EKPPD tahun 2022 serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas publik.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjadi dasar konseptual utama dalam penelitian ini. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* (pemberi kewenangan) dan *agent* (pengelola) sering kali memunculkan konflik akibat perbedaan tujuan dan adanya asimetri informasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah pusat bertindak sebagai *principal*, sementara pemerintah daerah berperan sebagai *agent*. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan melaksanakan program pembangunan, namun tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah pusat. Ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak menimbulkan risiko *moral hazard*, sehingga mekanisme pengawasan eksternal, seperti audit BPK dan evaluasi kinerja (EKPPD), sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang diperkirakan memengaruhi kinerja. Daerah dengan aset lebih besar biasanya memiliki kapasitas fiskal, sumber daya, dan infrastruktur yang lebih memadai untuk mendukung pelayanan publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin tinggi pula peluang peningkatan kinerjanya (Sudarsana, 2013).

Selain ukuran, tingkat kekayaan daerah juga menjadi indikator penting. Kekayaan daerah tercermin dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. PAD menunjukkan kemandirian fiskal, di mana daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan lokal akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan anggaran serta lebih leluasa dalam mendanai pembangunan (Sumarjo, 2010; Mustikarini & Fitriyani, 2012). Oleh karena itu, secara teoritis, semakin tinggi tingkat PAD, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat yang tercermin dari Dana Alokasi Umum (DAU) justru berpotensi menimbulkan masalah. Ketika pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer pusat, insentif untuk menggali potensi pendapatan lokal cenderung menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan penggunaan anggaran menjadi tidak optimal serta menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan (Halim, 2016; Ratulangi dkk., 2021). Dengan demikian, ketergantungan fiskal diperkirakan berdampak negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Belanja modal juga dipandang sebagai variabel penting. Anggaran belanja modal dialokasikan untuk membiayai pembangunan aset jangka panjang, seperti infrastruktur dan sarana publik. Dalam kerangka teori, peningkatan belanja modal seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian menemukan belanja modal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena terkendala oleh perencanaan dan pengawasan yang lemah (Izaturrohman, 2018; Hatimah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal dan kinerja masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

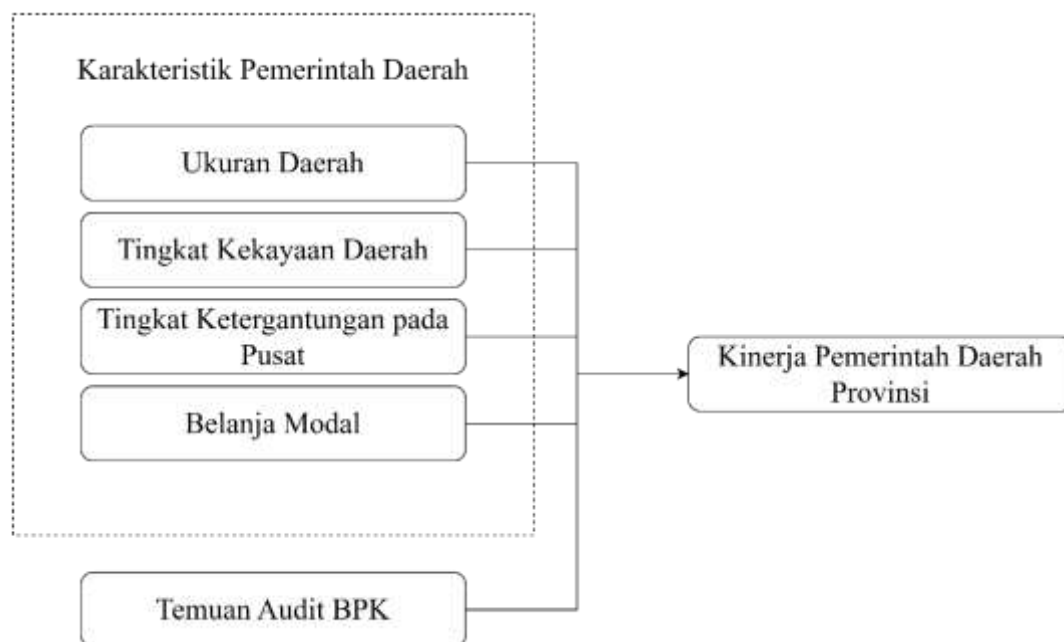
Terakhir, temuan audit BPK menjadi indikator yang langsung mencerminkan kualitas tata kelola daerah. Temuan audit berupa penyimpangan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, maupun kelemahan dalam pengendalian internal biasanya berimplikasi negatif terhadap skor kinerja

pemerintah daerah. Mustikarini & Fitriasari (2012) serta Sudarsana (2013) menemukan bahwa semakin banyak temuan audit, semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Artinya, temuan audit BPK dapat digunakan sebagai proksi untuk menilai efektivitas pengawasan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menguji secara empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran, kekayaan, ketergantungan fiskal, dan belanja modal) serta temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sejumlah penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriasari (2012), serta Dwi Agintha (2024) secara konsisten menunjukkan bahwa size pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Studi tersebut berasumsi bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula kapasitas aset yang dimiliki untuk menunjang operasional pemerintahan, yang menurut Sumarjo (2010) merupakan prasyarat utama untuk memberikan pelayanan publik yang cemerlang. Selain itu, persyaratan kinerja untuk kinerja kota yang lebih besar jauh lebih tinggi. Berangkat dari landasan teoretis dan bukti empiris, hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif pada kinerja Pemda provinsi

Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

Menurut Sumarjo (2010), peningkatan PAD berperan sebagai variabel yang mendukung kinerja ekonomi makro. Terdapat sebuah siklus positif di mana pertumbuhan ekonomi akan mendorong investasi, yang kemudian memperkuat pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan tingginya investasi akan kembali berkontribusi pada peningkatan PAD. Lebih lanjut, Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menekankan bahwa kenaikan kapasitas fiskal daerah melalui PAD ini idealnya harus diiringi dengan perbaikan kualitas

pelayanan publik, sebab layanan yang berkualitas adalah cerminan dari kinerja pemerintah daerah yang baik. Hubungan positif antara pendapatan dan kinerja optimal pemerintah didukung oleh temuan dalam penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) serta Sudarsana (2013). Dengan merujuk pada uraian konseptual sebelumnya, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda provinsi.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

Mekanisme pengawasan adalah poin utama yang merupakan perdebatan dalam lingkup kajian ini. Daerah yang menerima DAU dalam jumlah besar cenderung mendapatkan pemantauan yang lebih intensif dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan alokasinya. Pengawasan yang lebih ketat ini menjadi faktor pendorong yang memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Kendati pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan DAU, pemanfaatannya seharusnya tetap difokuskan pada esensi otonomi daerah, yaitu mendorong perbaikan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui hal tersebut diharapkan pemerintah daerah akan berkinerja lebih baik dalam melayani masyarakatnya dengan semakin besarnya DAU yang diterima. Berdasarkan logika ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda provinsi.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

Özbebek (2011) melalui Dwi Agintha (2024) berpendapat belanja modal adalah pembayaran yang dimanfaatkan membeli fixed asset atau untuk meningkatkan umur yang berguna dari aset tetap yang ada. Dengan kata lain, belanja modal dilakukan untuk mengakuisisi atau meningkatkan aset tetap seperti peralatan, properti, dan bangunan industri. Pembangunan infrastruktur dan sarana yang masif, yang tercermin dari besarnya alokasi belanja modal, merupakan wujud investasi oleh pemerintah daerah. Sudarsana (2013) berpendapat bahwa peningkatan pembangunan ini akan secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang berujung pada kinerja daerah yang lebih baik. Dengan demikian, hipotesis berikut ini diajukan:

H4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda provinsi.

Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

Kajian yang dilaksanakan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012) serta Sudarsana (2013) secara konsisten membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Dasar pemikiran dari hubungan negatif ini adalah bahwa temuan audit BPK merupakan indikasi adanya pelanggaran terhadap sistem pengendalian internal dan peraturan yang berlaku. Banyaknya pelanggaran yang terjadi berbanding lurus dengan menurunnya kinerja pemerintah daerah, sebuah pandangan yang dikemukakan oleh Sudarsana (2013). Oleh karena itu, berikut ini adalah hipotesis akhir:

H5: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda provinsi.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2022 sebagai populasi, dengan pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini bertujuan agar hanya unit analisis yang memenuhi kelengkapan data yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi neraca untuk informasi total aset; LRA untuk data PAD, DAU, dan total realisasi pendapatan; serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 untuk memperoleh nilai temuan audit.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel dependen adalah skor kinerja pemerintah daerah, sedangkan untuk variabel independen adalah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen Skor Kinerja Pemerintah Daerah	SK	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikategorikan
Variabel Dependen Ukuran Pemerintah Daerah Tingkat Kekayaan Daerah Tingkat Ketergantungan Daerah Belanja Modal	Ln TA PAD DAU BM	Logaritma natural (Ln) total aset pemerintah provinsi Rasio PAD terhadap total pendapatan (PAD / Total Pendapatan) Rasio DAU terhadap total pendapatan (DAU / Total Pendapatan) Rasio belanja modal terhadap total belanja (Belanja Modal / Total Belanja)
Temuan Audit BPK	Temuan	Jumlah temuan audit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan provinsi tahun 2022

Model Penelitian

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model kausal dengan tujuan menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi logistik ordinal, karena variabel dependen berupa skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berskala ordinal.

Variabel independen terdiri atas ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, ketergantungan fiskal, belanja modal, serta temuan audit BPK. Ukuran pemerintah daerah diproses dengan logaritma natural total aset, sedangkan kekayaan daerah diukur dengan rasio PAD terhadap total pendapatan. Ketergantungan fiskal dihitung melalui rasio DAU terhadap total pendapatan, sementara belanja modal diukur dengan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Temuan audit BPK dihitung berdasarkan jumlah temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022.

Model regresi logistik ordinal dipilih karena sesuai untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan menggunakan model ini, dapat dianalisis seberapa besar peluang suatu pemerintah provinsi memperoleh skor kinerja yang lebih tinggi apabila terjadi perubahan dalam masing-masing variabel independen.

Secara umum, model penelitian ini dirancang untuk menjawab hipotesis mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan, ketergantungan fiskal, belanja modal, dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, model ini dapat memberikan gambaran empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah provinsi serta memperkuat kerangka teori agensi dalam konteks akuntabilitas pemerintahan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel serta hasil pengolahan data yang meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi, dan hasil regresi logistik ordinal.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria ketersediaan data terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, serta hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2022. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah pemerintah provinsi yang memenuhi syarat sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Jumlah total pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2022	34
2.	Pemerintah provinsi yang tidak memiliki data lengkap (laporan keuangan, LHP BPK, dan EKPPD)	(0)
	Jumlah pemerintah provinsi yang memenuhi syarat sampel	34
	Jumlah sampel penelitian	34

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

Melalui Tabel 3, terdapat 34 provinsi diobservasi. Skor Kinerja (SK) memiliki nilai *minimum* 2,00 dan *maximum* 4,00, dengan *mean* 2,9118 dan standar deviasi 0,79268. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah bervariasi, namun sebagian besar berada pada level sedang hingga tinggi.

Variabel Logaritma Total Aset (Ln TA) memiliki nilai *minimum* sebesar 27,37 serta *maximum* sebesar 34,16, dengan rata-rata sebesar 30,3114 serta standar deviasi sebesar 1,11457. Rata-rata nilai logaritma aset ini mencerminkan perbedaan skala aset yang cukup besar antar pemerintah daerah.

Selanjutnya, variabel Pendapatan PAD menunjukkan nilai *minimum* sebesar 0,0205 dan *maximum* 0,7477. *Mean* PAD sebesar 0,417364 dengan standar deviasi 0,2065344 mencerminkan bahwa sebagian besar daerah memiliki kontribusi PAD yang relatif rendah terhadap total pendapatannya, serta terdapat disparitas kemampuan fiskal antar daerah.

Variabel DAU menunjukkan nilai *minimum* 0,0000 dan *maximum* 0,5216, dengan *mean* 0,239714 serta standar deviasi yang sangat kecil, yaitu 0,1422350. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi DAU relatif homogen di antara daerah yang diteliti, atau dapat juga disebabkan oleh skala pengukuran yang sangat kecil.

Variabel BM memiliki nilai *minimum* 0,0716 dan *maximum* 0,3290. Rata-rata yang dihasilkan BM sebesar 0,186811 dengan standar deviasi 0,0650473 mengindikasikan bahwa bagian belanja modal terhadap total belanja bervariasi antar pemerintah daerah, meskipun sebagian besar masih dalam kisaran yang relatif rendah.

Terakhir, variabel Temuan Audit memiliki nilai *minimum* 0,0001 dan *maximum* 0,1564 serta *mean* 0,17772 dan standar deviasi 0,342684. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa intensitas temuan audit BPK bervariasi cukup signifikan antar pemerintah daerah, yang dapat menjadi indikasi adanya perbedaan tingkat kepatuhan atau efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan adanya keragaman karakteristik keuangan dan kinerja antar pemerintah daerah yang diteliti. Adanya variasi tersebut memberikan landasan

yang kuat untuk melanjutkan ke tahap analisis inferensial guna menguji sejauh mana masing-masing variabel memengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SK	34	2,00	4,00	2,9118	,79268
Ln TA	34	27,37	34,16	30,3114	1,11457
PAD	34	,0205	,7477	,417364	,2065344
DAU	34	,0000	,5216	,239714	,1422350
BM	34	,0716	,3290	,186811	,0650473
Temuan	34	,0001	,1564	,017772	,0342684
Valid N (listwise)	34				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 menyajikan hasil uji multikolinieritas. Untuk mencegah masalah multikolinearitas, variabel independen dalam model regresi sebaiknya tidak memiliki korelasi yang signifikan satu sama lain. Jika nilai *tolerance* > 0,100 dan VIF < 10,00 maka gejala multikolinieritas tidak terjadi, namun apabila nilai *tolerance* < 0,100 dan VIF > 10,00 gejala multikolinieritas terjadi. Hasil uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
Ln TA	,480	2,084
PAD	,695	1,438
DAU	,455	2,196
BM	,776	1,289
Temuan	,950	1,053

a. *Dependent Variable* : Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: data diolah dengan SPSS

Melalui pengujian, teridentifikasi seluruh variabel independen menunjukkan *collinearity tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, yang menunjukkan bahwa secara umum model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas yang serius. Namun demikian, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai *tolerance* paling rendah, yaitu sebesar 0,455, dan VIF tertinggi sebesar 2,196.

Nilai *tolerance* untuk variabel Logaritma Total Aset (Ln TA) tercatat sebesar 0,480, sedangkan nilai VIF-nya sebesar 2,084. Kedua nilai tersebut masih berada dalam rentang yang dapat diterima, sehingga tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas. Sementara itu, variabel PAD dan BM menunjukkan nilai VIF yang rendah, sebesar 1,438 dan 1,289, dengan nilai *tolerance* yang cukup tinggi, yaitu 0,695 dan 0,776. Sebagai hasil dari korelasi yang rendah dengan variabel independen lainnya dalam model, variabel Temuan Audit tidak mengalami masalah multikolinearitas, sesuai dengan hasil analisis variabel, yang juga menunjukkan nilai *tolerance* 0,950 dan VIF 1,053.

Uji Model FIT

Sebuah model dapat dianggap cocok atau *fit* jika dua kriteria terpenuhi. Pertama, nilai -2 *Log Likelihood* dari model akhir harus lebih kecil dibandingkan nilai pada model yang hanya menyertakan *intercept*. Kedua, nilai signifikansi dari perbandingan tersebut harus kurang dari 0,05. Jika semua kondisi terpenuhi, ini berarti bahwa penyertaan variabel independen dalam model

secara signifikan meningkatkan kelayakannya dibandingkan dengan model sederhana yang hanya menggunakan intersep. Oleh karena itu, model tersebut dinyatakan layak atau *fit* untuk digunakan dalam analisis.

Hasil uji di atas menyajikan kecocokan model, di mana nilai *-2 Log Likelihood* untuk model *Intercept Only* adalah 73,916, sementara untuk model *Final* adalah 59,272. Perbedaan antara kedua nilai ini menghasilkan statistik *Chi-Square* sebesar 14,644 ($df = 5$) dengan tingkat signifikansi (Sig.) 0,012. Karena nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi logistik ordinal ini secara statistik signifikan dan menunjukkan perbaikan yang berarti dari model dasar. Dengan demikian, model yang menyertakan variabel-variabel independen ini dianggap layak untuk digunakan dalam menganalisis variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Model FIT

Model	-2 Log			
	Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	73,916			
Final	59,272	14,644	5	,012

Sumber: data diolah dengan SPSS

Uji Pseudo R-Square

Dalam model PLUM, Pseudo R-square adalah metrik yang digunakan mengevaluasi seberapa besar proporsi variabel independen sehingga mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Konsep tersebut sejalan dengan koefisien determinasi dalam regresi linier, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Apabila mencapai 1 menunjukkan model mempunyai daya jelaskan yang tinggi terhadap variabel terikat.

Tabel 6
Pseudo R-Square

Cox and Snell	,350
Nagelkerke	,395
McFadden	,198

Sumber: data diolah dengan SPSS

Uji Parallel Lines

Didasarkan pada anggapan bahwa seluruh kategori berbagi parameter yang identik dalam regresi logistik ordinal diuji melalui *Parallel Lines Test*. Asumsi ini dianggap terpenuhi, dan model dinilai cocok, apabila hasil uji tidak signifikan ($p > 0,05$). Sebaliknya, hasil yang signifikan ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa asumsi dilanggar dan model tidak cocok.

Tabel 7
Parallel Lines

Model	-2 Log			
	Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null Hypothesis	59,272			
General	54,401	4,870	5	,432

Sumber: data diolah dengan SPSS

Dengan (df) sebesar 5 dan tingkat (Sig.) sebesar 0,432, hasil analisis pada Tabel 4.7 menunjukkan chi-kuadrat sebesar 4,870. Karena *parameter slope* antar kategori skor kinerja pemerintah daerah dianggap tidak berbeda, maka hipotesis nol tidak ditolak karena nilai signifikansinya jauh dari batas 0,05. Hal tersebut menyatakan model memenuhi asumsi garis sejajar yang mengindikasikan bahwa model regresi logistik ordinal menunjukkan tingkat kemampuan menjelaskan yang memadai. Validitas dari uji ini juga diperkuat dengan tidak adanya perbedaan signifikan antara model null dan model general, sehingga tidak terdapat pelanggaran asumsi dasar dalam model ordinal logistik yang digunakan

Uji Hipotesis *Parameter Estimates*

Dalam verifikasi hipotesis, p-value masing-masing variabel dibandingkan dengan ambang signifikansi 0,05. Jika p-value lebih rendah dibanding batas tersebut, maka koefisien regresi dinyatakan signifikan secara statistik pada level kepercayaan 95%. Pengaruh yang signifikan ditunjukkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya, H_0 diterima dan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen jika nilai p-value lebih besar dari 0,05.

Tabel 8
Uji Hipotesis *Parameter Estimates*

		Estimate	Sig.
Threshold	[SK = 2,00]	-0,23	,999
	[SK = 3,00]	2,312	,881
Location	Ln_TA	0,042	,930
	PAD	4,099	,005
	DAU	-3,614	,344
	BM	-6,120	,321
	Temuan	-4,256	,705

Hipotesis pertama telah diuji, dan hasilnya mengindikasikan tidak ada keterkaitan yang bermakna secara statistik antara skor kinerja pemerintah daerah provinsi dengan ukuran pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan logaritma total aset, atau Ln TA yang berarti **H_1 ditolak**. Meskipun arah hubungan menunjukkan koefisien regresi yang positif sebesar 0,042, nilai signifikansinya 0,930, yang lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan peningkatan total aset tidak secara otomatis memberikan peluang suatu daerah untuk mendapatkan skor kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, daerah dengan total aset besar ataupun kecil memiliki probabilitas yang serupa untuk berada di kategori kinerja manapun (rendah, sedang, atau tinggi).

Hasil tersebut menunjukkan ukuran pemerintah daerah bukanlah faktor terbaik untuk mempengaruhi kinerja. Secara teoritis, pemerintah daerah yang lebih besar harus didorong untuk memberikan laporan kinerja yang lebih transparan, terutama dalam hal informasi positif yang dapat mendorong peningkatan nilai kinerja, dan mereka dituntut mengoptimalkan sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan layanan publik. Selain itu, size yang besar juga seharusnya memberikan kemudahan dalam operasional dan pelayanan publik. Namun demikian, ketidaksignifikanan hubungan tersebut menunjukkan kemungkinan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset daerah, di mana potensi keuangan yang besar belum dimanfaatkan secara efisien.

Tingkat kekayaan daerah, yang diproksikan melalui PAD, terbukti dari hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap skor kinerja pemerintah provinsi. Kesimpulan ini didukung oleh koefisien regresi sebesar 4,099 serta nilai signifikansi sebesar 0,05. Karena kapasitas fiskal kuat memungkinkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik, kesimpulan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD suatu provinsi, semakin besar probabilitas provinsi tersebut memperoleh skor kinerja yang lebih tinggi. Berdasarkan analisis tersebut maka **H_2 diterima**. Kajian Mustikarini dan Fitriasisi (2012), Sudarsana (2013),

serta Hatimah (2018) mengindikasikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Kajian tersebut didukung lebih lanjut oleh temuan penelitian ini.

Dari hasil analisis terhadap hipotesis yang diajukan, skor kinerja pemerintah provinsi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Temuan ini tidak didukung oleh tingkat signifikansi yang memadai, yakni nilai signifikansi sebesar 0,344, meskipun nilai koefisien regresi yang dihasilkan sangat besar. Koefisien negatif mengindikasikan adanya korelasi dengan penurunan kinerja. Namun, hasil menunjukkan bahwa fluktuasi dalam tingkat ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat tidak mampu menjelaskan variasi peringkat kinerja provinsi secara statistik sehingga **H3 ditolak**. Berdasarkan kondisi ini, meskipun DAU merupakan sumber utama pendanaan operasional di sebagian besar daerah, tingginya persentase pembayaran transfer dari pusat mungkin tidak secara akurat merepresentasikan seberapa baik daerah dalam mengorganisir pelayanan publik dan pemerintahan. Ketergantungan yang tinggi pada dana pusat bisa saja tidak diiringi oleh efisiensi dan efektivitas dalam penggunaannya, sehingga tidak menghasilkan perbaikan yang berarti dalam indikator kinerja.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui alokasi belanja modal sebagai ukuran persentase uang yang dibelanjakan untuk investasi jangka panjang, tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kinerja pemerintah provinsi. Koefisien regresi yang bernilai -6,120 dan tingkat signifikansi 0,321 (di atas 0,05) menandakan bahwa meskipun arah hubungannya negatif, kontribusinya dalam menjelaskan perbedaan skor kinerja antar daerah dalam model ini tidaklah signifikan maka **H4 ditolak**.

Komitmen sebuah pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan dapat tercermin dari besaran belanja modalnya. Oleh karena itu, secara teoretis, belanja modal seharusnya dianggap sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh belanja modal dapat mencerminkan permasalahan dalam efektivitas alokasi dan pemanfaatan belanja modal di tingkat provinsi. Besarnya proporsi anggaran belanja modal tidak selalu diikuti oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan yang baik, sehingga *output* dan *outcome* tidak secara langsung tercermin dalam skor kinerja. Selain itu, variasi belanja modal antar provinsi yang tidak terlalu lebar dapat menyebabkan kontribusi variabel ini terhadap model menjadi lemah. Berbeda dengan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang mengidentifikasi hubungan negatif belanja daerah terhadap kinerja, hasil penelitian justru searah terhadap kajian Sudarsana (2013).

Nilai *p-value* sebesar -4,256 dan koefisien 0,705 dari hasil regresi ordinal menunjukkan bahwa temuan audit tidak memiliki dampak nyata pada peringkat kinerja provinsi. Ini berarti fluktuasi jumlah temuan BPK tidak berdampak nyata pada kinerja yang diukur. Arah hubungan yang negatif menggambarkan bahwa semakin banyak temuan audit, terdapat kecenderungan penurunan skor kinerja sehingga **H5 ditolak**. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah temuan audit belum menjadi penentu utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, atau bahwa pengaruhnya tidak langsung dan mungkin dimediasi oleh faktor-faktor lain seperti respons tindak lanjut terhadap temuan, kualitas pengelolaan internal, atau tingkat kepatuhan terhadap standar akuntabilitas. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri kemungkinan tidak menjadikan temuan audit sebagai indikator utama dalam skoring kinerja pemerintah daerah provinsi. Menurut kajian Sudarsana (2013) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), hasil audit secara signifikan menurunkan peringkat kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, kesimpulan ini tidak didukung secara empiris oleh temuan analisis.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk menilai secara empiris dampak dari karakteristik pemerintah daerah dan hasil audit BPK terhadap keberhasilan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2022, dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah disediakan. Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan gambaran yang akurat dan relevan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi

kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini akan menggunakan data LPPD dan EKPPD tahun 2022 untuk menganalisis secara spesifik pengaruh dari variabel ukuran pemerintah, tingkat kekayaan daerah, ketergantungan pada pusat, belanja modal, serta hasil audit BPK terhadap skor kinerja pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilaksanakan berhasil mengidentifikasi sejumlah temuan utama yang dapat dijelaskan secara mendalam mengacu pada hasil analisis dan pengolahan data yang telah dipaparkan sebagai berikut :

1. Kinerja pemerintah provinsi berkorelasi positif dengan ukuran pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki aset lebih besar cenderung mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan lebih efektif.
2. Kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan PAD secara mandiri menjadi faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjanya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kekayaan daerah yang direpresentasikan oleh PAD, maka semakin tinggi pula pencapaian kinerjanya.
3. Tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana pusat dapat menurunkan insentif pemerintah daerah untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Akibatnya, tingkat ketergantungan pada pusat, yang diukur melalui porsi Dana Alokasi Umum (DAU), ditemukan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Analisis mengindikasikan bahwa belanja modal cenderung memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Namun demikian, berdasarkan nilai signifikansi yang dihasilkan, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan signifikan. Meskipun secara teoritis pembangunan aset tetap mendukung pelayanan publik, dalam praktiknya belum menunjukkan hubungan yang kuat dengan peningkatan kinerja.
5. Data menunjukkan korelasi negatif dan signifikan secara statistik antara skor kinerja pemerintah daerah dan jumlah temuan audit dari BPK. Temuan audit yang semakin banyak dapat diartikan sebagai indikasi adanya kelemahan dalam aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan. Kelemahan inilah yang kemudian menjadi faktor penyebab rendahnya skor kinerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa karakteristik internal pemerintah daerah, bersama dengan temuan audit dari BPK, merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kinerja pemerintahan daerah. Meskipun demikian, tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bervariasi; beberapa menunjukkan pengaruh yang kuat, sementara yang lain hanya bersifat moderat atau lemah.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data yang bersifat *cross-sectional*, yaitu hanya mencakup tahun anggaran 2022. Penggunaan data tunggal ini menyebabkan studi ini tidak dapat menyajikan analisis tren kinerja pemerintah daerah secara longitudinal.
2. Ruang lingkup penelitian terbatas pada pemerintah daerah tingkat provinsi, sehingga hasilnya tidak secara langsung dapat digeneralisasi ke tingkat kabupaten/kota.
3. Variabel temuan audit yang digunakan hanya memperhitungkan jumlah temuan secara kuantitatif, tanpa mempertimbangkan tingkat materialitas atau jenis pelanggaran yang terjadi.
4. Model penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan seperti kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun aspek politik.

Saran

Menanggapi temuan dan analisis dari penelitian ini, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi sebagai landasan dalam pengembangan penelitian serta pengembangan kebijakan di masa yang akan datang :

1. Implikasi Kebijakan

Temuan dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan penting. Pertama, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskalnya dengan cara mengoptimalkan potensi PAD. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada DAU dan memberikan fleksibilitas lebih dalam menyusun program pembangunan yang relevan dengan

kebutuhan lokal. Kedua, mengingat adanya pengaruh negatif dari temuan audit terhadap kinerja, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ini mencakup upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, penanganan temuan audit secara berkelanjutan, perbaikan sistem pengendalian internal, dan penguatan akuntabilitas publik demi kinerja yang lebih efisien dan transparan.

2. Saran penelitian yang akan datang

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data secara longitudinal agar dapat menganalisis hubungan antar variabel dari waktu ke waktu serta menangkap dinamika kinerja pemerintahan yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitiannya dengan menyertakan pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini akan membuat hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan dapat diterapkan pada seluruh level pemerintahan daerah. Pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah dapat diperoleh dengan menyertakan variabel-variabel baru dalam analisis di masa depan. Sebagai contoh, variabel seperti kualitas tata kelola, indeks transparansi fiskal, stabilitas politik, atau partisipasi publik dapat ditambahkan untuk memperkaya model penelitian. Tidak hanya itu, pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan menyertakan data kualitatif dapat memperkaya analisis dan menangkap konteks sosial, kelembagaan, dan struktural yang mungkin tidak terjangkau oleh pendekatan kuantitatif semata.

REFERENSI

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 17–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>
- Bastian, I. (2018). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan* (Jatiningrum, Ed.; 3 ed.). Salemba Empat.
- Çabiri, K. (2017). Principal-Agent Problem: a Theoretical View of Administrative Behaviour.
- Chen, X. (2018). Principal-Agent Theory and Its Application to Administrative Management. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 179.
- Dwi Agintha, N. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 24(1), 2623–2650. <https://doi.org/10.30596/19226>
- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). ANALISIS VALUE FOR MONEY DAN AKUNTABILITAS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hatimah, K. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU.
- Izaturohmah, U. (2018). 2018 - PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Dalam *Journal of Financial Economics* (Nomor 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. Dalam *State and Local Government Review* (Vol. 52, Nomor 3, hlm. 200–213). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
- Liswatin. (2022). INOVASI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KONAWE. *SIBATIK JOURNAL*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Milán-García, J., Rueda-López, N., & De Pablo-Valenciano, J. (2022). Local government efficiency: reviewing determinants and setting new trends. *International Transactions in Operational Research*, 29(5), 2871–2898. <https://doi.org/10.1111/itor.13032>
- Mustikarini, W., & Fitriasisi, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.

- Oktari, A., Solikhin, A., & Dahmiri. (2024). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.32381>
- Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Ratulangi, A. C., Pangemanan, S. E., & Waworundeng, W. (2021). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan. JURNAL GOVERNANCE, 1.
- Setiawan, W. (2012). PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.
- Sofi'ah Ima Mu'tiani, & Amanah Lailatul. (2019). PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN Lailatul Amanah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Sudarsana, H. S. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Lalporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia).
- Sumarjo, H. (2010a). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.
- Sumarjo, H. (2010b). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Susilo, N. (2023, Juni 15). Presiden Soroti Pemborosan Anggaran untuk Perjalanan Dinas dan Rapat. Kompas.
- Trilaksono, B. A. (2020). ANALISIS VALUE FOR MONEY DAN AKUNTABILITAS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Wijayanti, R. P. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen (3 ed.). WIDYA GAMA PRESS.2.